



Peneguhan Masyarakat Multikultural Indonesia melalui Aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Totok Tolak*

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Diterima Pebruari 2018; Disetujui April 2018; Dipublikasikan Juni 2018

Abstrak

Pluralisme Indonesia secara eksplisit memberikan tantangan tersendiri bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada abad 21 keragaman kultur di Indonesia mendapatkan ujian yang serius, yang ditandai berbagai konflik kekerasan yang bersifat komunal, seperti konflik Ambon, Poso, dan Sambas. Untuk itu, perlu adanya strategi fundamental dalam dunia pendidikan, strategi dalam konteks ini adalah melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran dan eksistensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam peneguhan masyarakat multikultural Indonesia. Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini, yaitu kepustakaan atau library research. Data yang digunakan pada karya tulis ini bersumber dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Dengan pembelajaran PPKn diharapkan mampu meneguhkan masyarakat multikultural Indonesia yang damai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan keharmonisan.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Multikultural

Abstract

Indonesian pluralism explicitly presents its own challenges for the Unitary State of the Republic of Indonesia. In the 21st century, the diversity of cultures in Indonesia gets a serious test, characterized by various communal violent conflicts, such as the Ambon, Poso and Sambas conflicts. Therefore, the need for a fundamental strategy in the world of education, strategy in this context is through Civic Education. The purpose of this paper is to provide a deeper knowledge and insight into the role and existence of Civic Education in the affirmation of Indonesian multicultural society. Writing method used in the preparation of this paper, the library or library research. With the learning of PPKn is expected to strengthen the peaceful multicultural society of Indonesia in the frame of Bhinneka Tunggal Ika and harmony.

Keywords: Civic Education, Multicultural

How to Cite: Tolak, T. (2018). Peneguhan Masyarakat Multikultural Indonesia melalui Aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1): 21-30.

*Corresponding author:

E-mail: totokdoang1992@gmail.com

ISSN 2085-482X (Print)

ISSN 2407-7429 (Online)

PENDAHULUAN

Pengalaman Indonesia sejak masa awal kemerdekaan, khususnya pada masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno dan masa Orde Baru Presiden Soeharto memperlihatkan kecenderungan kuat pada politik monokulturalisme. Lebih lanjut Azra (2006) mengemukakan bahwa dalam politik ini, yang diberlakukan bukannya penghormatan terhadap keragaman (kebhinnekaan, atau multikulturalisme), tetapi sebaliknya adalah keseragaman (monokulturalisme) atas nama stabilitas untuk pembangunan.

Pada saat orde baru berakhir, kesadaran masyarakat terkait pentingnya memahami kebhinnekaan dan multikulturalisme Indonesia muncul kembali dan dikemas dalam semangat baru. Di samping itu, wacana multikulturalisme Indonesia yang semakin mendapat tempat dalam masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa kondisi (Saifuddin, 2006), *pertama*, desentralisasi mendorong ditingkatkannya batas-batas identitas kebudayaan di Indonesia, baik identitas etnik, agama maupun golongan. Dari perubahan yang terjadi, terdapat tantangan yang cukup besar dalam integrasi nasional dan sosial. *Kedua*, dimensi kebudayaan kurang mendapatkan perhatian dengan diterapkannya desentralisasi politik kontemporer. Keputusan untuk melaksanakan desentralisasi lebih pada keputusan politik oleh para elit politik partai ketimbang mempertimbangkan dimensi kebudayaan yang sesungguhnya sangat mendasar dan penting. *Ketiga*, pada saat kebudayaan bangsa mulai menampakkan batas-batasnya dengan nyata dan tujuan primordialisme mulai muncul kepermukaan dengan konflik yang cukup akut antar agama, golongan, dan etnik tentu akan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian para cendekiawan dan para elit politik mulai bergegas mencari solusinya untuk meneguhkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa.

Berkaitan dengan kondisi di atas, bentuk tubuh Indonesia Baru dari hasil reformasi adalah sebuah “masyarakat multikultural Indonesia”. Berbeda dengan masyarakat majemuk yang menunjukkan keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa, multikulturalisme dikembangkan dari konsep pluralisme budaya dengan menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat

(Suparlan, 2005). Multikulturalisme Indonesia memngusung persamaan, semangat hidup rukun dalam keragaman dan perbedaan budaya secara individu ataupun kelompok masyarakat (Azra, 2006). Refleksi yang dapat diambil bahwa Individu dalam hal ini dilihat kesatuan sosial dan budaya di mana mereka menjadi bagian darinya. Dengan demikian, bentuk dari masyarakat Indonesia yang beragam tidak dan bukan lagi dalam bentuk keanekaragaman suku dan budaya bangsa melainkan keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. (Blum, 2001).

Tuntutan pengembangan masyarakat multikultural tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan warganegara. Seiring dengan perkembangan konstelasi kehidupan, pada era kontemporer bangsa Indonesia dihadapkan pada perubahan-perubahan dan ketidakpastian dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan dan politik. Dalam kehidupan ini, perubahan merupakan suatu kaniscayaan karena tidak ada yang tetap kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia dan terjadi secara terus menerus. Perubahan yang terjadi pada diri manusia menyangkut perubahan langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan sikap dan tindakan manusia dalam kehidupan global.

Sebagaimana dikemukakan di atas, potensi konflik dalam masyarakat yang multikultural cukup besar, karena itu pendidikan yang mampu membangun karakter warga negara yang cinta damai mutlak diperlukan. Warga negara tanpa dibekali karakter cinta damai tentu sangat sulit dalam menghadapi suatu perubahan yang memiliki tantangan dan konflik yang muncul dari bingkai kebhinnekaan tersebut. Dalam hal ini, pendidikan adalah jembatan paling penting untuk membentuk karakter masyarakat yang multikultural. Hidayatullah (2011) menyebutkan bahwa

membangun karakter bangsa merupakan suatu usaha yang dirasakan penting yang harus diberikan pada manusia. Pembentukan karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 adalah tujuan yang mulia dari sistem pendidikan. Pernyataan tersebut memberikan penguatan bahwa pembangunan karakter tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Dalam hal ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan berbasis multikultural, sebab Pendidikan Kewarganegaraan mengemban nilai karakter bangsa yang salah satunya adalah toleransi, tanggung jawab, dan integritas.

Terkait dengan peneguhan masyarakat multikultural di atas, peran penting pendidikan menjadi tak terelakan. Azra (2006) berpendapat bahwa untuk meneguhkan masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak dapat diterima begitu saja atau *trial and error*. Maka dari itu, diperlukan usaha yang sistematis, integrated, programatis, dan berkesinambungan. Salah satu strategi penting itu adalah Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, dan bahkan informal di masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sederhananya merupakan mata pelajaran yang memiliki domain kajian dalam konteks pendidikan nasional yang memiliki peran signifikan dan strategis untuk membentuk karakter bangsa Indonesia di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman dan perbedaan bangsa Indonesia tertuang dalam prinsip berbhinneka, akan tetapi tergabung dalam satu kesatuan. Untuk itu, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi sentral dalam membangun negara bangsa Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan disini bisa menjadi strategi yang bisa dilakukan dalam peneguhan masyarakat multikultural Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas (*citizenship education*) yang memiliki perspektif kewarganegaraan dunia abad ke-21 yang terkenal dengan sebutan kewarganegaraan multidimensi yang salah satu cirinya memiliki karakteristik multikultural (Cogan & Derricott 1998). Terdapat delapan karakteristik yang merupakan karakteristik warga abad kedua puluh satu dalam perspektif PKn abad ke-21 (Karsten, Kubow, Matrai, & Pitiyanuwat, 2000);

Kubow, Grossman, & Ninomiya, 2000). Diantaranya sebagai berikut: 1) Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global; 2) Kemampuan untuk bekerja dengan orang lain secara kooperatif dan bertanggung jawab atas peran/tugas seseorang di masyarakat; 3) Kemampuan untuk memahami, menerima, menghargai dan menoleransi perbedaan budaya; 4) Kemampuan berpikir secara kritis dan sistematis; 5) Kesiediaan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan; 6) Keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumsi seseorang untuk melindungi lingkungan; 7) Kemampuan untuk peka terhadap dan membela hak asasi manusia (Hak perempuan, etnis minoritas); 8) Kesiediaan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Penulisan karya tulis ini didasarkan pada teori bahwa PKn merupakan salah satu ujung tombak dari pendidikan multikultural dalam rangka pembentukan karakter warga negara multikultural yang menghargai identitas budaya masyarakat yang plural secara demokratis, dan membentuk mosaik yang indah (*cultural pluralism: mozaik analogy*) dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Garcia, 1982).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode library research. Jenis metode ini merupakan salah satu jenis metode kualitatif. Penelitian pustaka ini hanya menggunakan literatur perpustakaan tanpa harus melakukan penelitian lapangan. Melalui metode ini nantinya studi pendahuluan akan terjawab sekaligus akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam berkenaan dengan gejala-gejala baru yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat (Mustika Zed, 2004). Penelitian kepustakaan juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk kegiatan terencana berkaitan dengan metode dalam pengumpulan data dari perpustakaan dengan cara mencatat, membaca, dan mengelolah dari berbagai macam bahan penelitian. Penelitian ini, sumber dan jenis datanya berasal dari berbagai macam referensi kepustakaan yang memiliki korelasi dengan judul yang akan dibahas. Hal demikian, teknik

pengumpulan datanya didasarkan pada studi kepustakaan.

Literatur utama yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas beberapa macam buku dan jurnal yang berkaitan dengan Multikultural, pendidikan multikultural, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk jenis data yang ada atau didapat bermacam-macam, dengan kata lain datanya merupakan gabungan dari data kualitatif. Sedangkan untuk tekniknya, dilakukan dengan cara *library research*, yaitu menganalisis berbagai macam literatur yang berkaitan dengan variabel dari judul karya tulis. Buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan judul sebagai data atau informasi yang *reliable* atau dapat dipertanggung jawabkan, selanjutnya data atau informasi yang didapat dari buku, jurnal, dan artikel dianalisis serta disusun berdasar variabel sehingga memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan tidak keluar dari bahasan atau judul yang sudah ditentukan.

Analisis data dilakukan secara induktif, yang di dalamnya terdiri dari dua tahap yaitu proses reduksi data dan penyajian data. Reduksi data bertujuan untuk penulis lebih mudah dalam memilih data yang valid, sedangkan penyajian data agar dimungkinkan penarikan simpulan. Informasi dikumpulkan secara tersusun sebagai bentuk dari penyajian data dan akan memberi kemudahan dalam penarikan kesimpulan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk gambar sehingga penulis dapat menguasai dengan baik.

Simpulan didapat sesusudah proses penyatuan data dan merujuk dari tujuan penulisan, ada analisis dan sintesis. Dalam kesimpulan juga harus memperhatikan bentuk penyajian data yang ada pada pembahasan yang menjelaskan ide pokok bahasan dalam karya tulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Multikultural dan Pendidikan Multikultural

Penjelasan yang sesuai untuk dijadikan referensi adalah pendapat Grace C. Huerta. Baginya, Pendidikan multikultural adalah pendekatan menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan yang mempengaruhi proses administrasi, retensi siswa, pedagogi, evaluasi, serta desain kurikulum (Huerta, 2016).

Pendapat yang secara substansial sama juga dikemukakan oleh Bank (1993) bahwa pendidikan

multikultural adalah reformasi transformasional yang dirancang untuk mengubah total lingkungan pendidikan sehingga beragam kelompok ras dan etnis, baik kelompok gender, dan siswa dari setiap kelompok kelas sosial akan mengalami kesempatan pendidikan yang sama di sekolah dan universitas. Lebih lanjut Bank menjelaskan Pendidikan multikultural mengasumsikan bahwa keragaman adalah bagian berharga dari jalinan negara juga masyarakat global. Multikulturalis berpendapat bahwa keragaman memperkaya masyarakat dan meningkatkan cara-cara di mana warga negara dapat memecahkan masalah.

Pendidikan dirasakan penting dan diperlukan untuk memberikan pembentukan sosial masyarakat dan membentuk *civic skill* seseorang, keterampilan yang dimaksud yaitu menjadi masyarakat atau warga negara yang baik yang di antaranya mampu bersikap saling menghormati dan menghargai berbagai jenis perbedaan untuk kelangsungan hidup yang rukun.

Konsep multikulturalisme mencakup tiga sub nilai. *Pertama*, meneguhkan identitas bangsa; *Kedua*, saling menghormati sesama dan berusaha untuk saling memahami selain budayanya sendiri; *Ketiga*, nyaman dengan perbedaan yang ada dan merasa senang dengan kebudayaan yang berbeda-beda, yaitu memandang perbedaan budaya seseorang itu sebagai suatu kekayaan bangsa. (Arif, 2008).

Sebagai negara kepulauan, keragaman budaya menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Tingkat kemajemukan yang tinggi menjadikannya sebagai negara multikultural. Perbedaan wilayah melahirkan suku, ras, bahasa dan kesenian yang sangat beragam. Keunikan ini merupakan kelebihan tersendiri bagi bangsa Indonesia sangat disayangkan jika kekayaan budaya bangsa Indonesia hilang. Entah dicuri bangsa lain, maupun melebur digerus budaya asing.

Globalisasi dan karakteristik yang semakin multikultural dari banyak negara dan masyarakat telah menyoroti apakah negara mampu mengembangkan warga negara yang berpendidikan multikultural dan terlibat secara global. Bagi sekolah dan guru untuk mempersiapkan warga negara untuk dididik secara multikultural dan terlibat secara global, setidaknya ada dua argumen yang menarik untuk dipertimbangkan. Yang pertama adalah globalisasi dan yang kedua adalah karakter dan pendidikan

kewarganegaraan. Kedua alasan ini sangat sesuai dengan sifat ganda yang aktif dan terkait dengan karakter kewarganegaraan seseorang. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, kerangka kecerdasan budaya akan diperkenalkan di sini untuk pengembangan kecerdasan budaya sebagai sarana untuk mengembangkan warga yang aktif dan peduli. Dalam hal ini, juga akan menyarankan bagaimana guru diposisikan untuk menghasilkan pertumbuhan siswa sebagai calon pemimpin melalui pembelajaran budaya di kelas (Goh, 2012: 396). Sementara literatur pendidikan karakter dan kewarganegaraan di Asia sering menyebutkan pemahaman lintas budaya dan pemikiran global sebagai hasil yang diinginkan, hanya sedikit model yang menerjemahkan dengan mudah ke dalam kurikulum kewarganegaraan atau pedagogi kelas. Dengan demikian, untuk menciptakan warga negara muda yang aktif dan peduli diperlukan seorang guru yang memiliki pemahaman atau kecerdasan budaya dan berwawasan global.

Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, kepedulian warga negara terhadap kebudayaan lokal semakin merosot. Kebudayaan warisan nenek moyang terancam hilang, melebur menjadi 'tumbal' globalisasi. Globalisasi memberi pengaruh yang kuat dan nyata terhadap pendidikan serta telah berhasil masuk ke dalam kebijakan pendidikan dan mempengaruhi praktik pengajaran dan pendidikan guru (Wang, Lin, Spalding, Odell, & Klecka, 2011). Maka dari itu, aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat nilai nasionalisme sangat diperlukan untuk menjawab dan membendung arus globalisasi. Sebab, nasionalisme erat kaitannya dengan identitas nasional. Dengan mengembangkan rasa cinta tanah air diiringi gerakan nyata dalam melestarikan budaya, kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia akan terjaga eksistensinya. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Multikultural untuk peneguhan masyarakat multikultural Indonesia.

Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ruang Lingkup mata pelajaran PKn untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
3. Hak Asasi Manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
5. Konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
6. Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
7. Pancasila, meliputi, kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka.
8. Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

Berdasarkan ruang lingkup PKn di atas, diketahui bahwa materi yang ada dalam PKn terdiri dari materi nilai-nilai, norma, perdamaian dunia,

hak asasi manusia dan peraturan hukum yang mengatur perilaku warga negara, sehingga diharapkan peserta didik dapat mengamalkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari menjadi karakter pribadi yang melekat pada setiap individu peserta didik. Melihat poin ke satu dari ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan menggambarkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang signifikan dalam peneguhan masyarakat multikultural Indonesia, sehingga perlu adanya langkah-langkah yang maksimal untuk mencapai ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan tersebut. Dengan demikian, materi-materi yang terdapat pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus benar-benar dimaksimalkan, mulai dari perencanaan pembelajaran, tujuan, materi, metode, dan media pembelajaran guna membentuk bangsa toleran dan bangsa Indonesia yang damai.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Multikultural

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan topik sentral yang memiliki peran strategis dalam pendidikan multikultural. Oleh karena itu, domain materi yang terdapat dalam Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah mulai dari tingkat SMP dan SMA harus mampu dieksplorasi bersamaan dengan nilai-nilai multikultural. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan kewarganegaraan merupakan nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 37). Penjelasan ini diperkuat dalam pasal 37 bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk generasi muda menjadi manusia yang memiliki budi pekerti luhur, karakter kebangsaan, dan cinta tanah air Indonesia. Dengan adanya ketentuan UU tersebut maka kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai basis pengembangan masyarakat multikultural dalam sistem pendidikan di Indonesia semakin jelas dan mantap.

Terkait dengan pendidikan multikultural, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi warganegara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan multikultural di Indonesia sebagaimana

dikemukakan oleh Tilaar (2004), yaitu membina pribadi-pribadi bangsa Indonesia yang mempunyai kebudayaan sukunya masing-masing, memelihara dan mengembangkannya, sekaligus membangun bangsa dengan kebudayaan Indonesia.

Terdapat arti penting yang dimiliki Pendidikan Kewarganegaraan bagi pendidikan multikultural di Indonesia didasarkan atas lima dimensi pendidikan multikultural sebagaimana dikemukakan oleh Bank (Tilaar, 2004), yaitu:

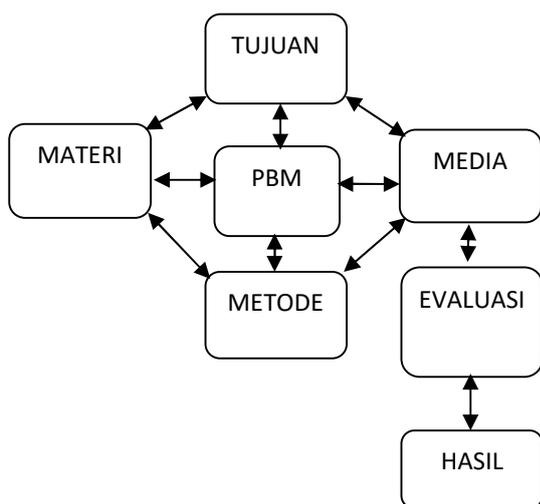
1. Integrasi konten, berbagai macam budaya yang ada dilingkungan masyarakat digeneralisasi dalam pelajaran.
2. Proses konstruksi pengetahuan, siswa diberikan kebebasan dalam mengembangkan pengetahuannya melalui pembebasan berpendapat dan mengantarkan siswa untuk memahami budaya dalam mata pelajaran.
3. *An equity pedagogy*, dalam proses belajar pembelajaran metode yang digunakan disesuaikan dengan pola belajar siswa untuk menunjang prestasi siswa yang beragam latar belakang suku, ras dan agama.
4. *Prejudice reduction*, memahami berbagai macam karakteristik siswa dengan tujuan untuk menentukan metode untuk mereka.
5. *Memberdayakan budaya sekolah*, membiasakan siswa untuk berpartisipasi aktif dilingkungan sekolah termasuk untuk berinteraksi dengan staff dan siswa yang memiliki latar budaya yang berbeda.

Dimensi di atas perlu dukungan dari kemampuan warga negara atau karakteristik warga negara. Cogan (1998) karakteristik yang harus dimiliki warganegara sebagai berikut:

1. Kemampuan mengenal dan memecahkan masalah.
2. Kemampuan bertanggung jawab dan bekerja sama dalam kehidupan masyarakat.
3. Kemampuan saling menghargai dan memahami berbagai macam perbedaan budaya.
4. Kemampuan berpikir sistematis dan kritis.
5. Kemampuan problem solving melalui cara yang adil dan damai.
6. Kemampuan mencintai lingkungan dengan cara merubah pola hidup.
7. Kemampuan peka terhadap problematika hak asasi manusia dan mempertahankannya, seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb.
8. Kemampuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Karakteristik warganegara di atas dibutuhkan sebagai dasar bagi peneguhan masyarakat multikultural, yang dalam pandangan Cogan (1998:2-3) diidentifikasi ke dalam lima atribut kewarganegaraan yang mungkin akan berbeda di tiap negara sesuai dengan sistem politik negara masing-masing, yakni: (1) *a sense of identity*; (2) *the enjoyment of certain rights*; (3) *the fulfilment of corresponding obligations*; (4) *a degree of interest and involvement in public affairs*; and (5) *an acceptance of basic societal values*. Bagi Indonesia, karakter kewarganegaraan akan memiliki kekhususan sesuai dengan ideologi yang dianut, yakni Pancasila, dan Konstitusi yang berlaku di Indonesia, ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Terdapat beberapa hal yang diperlukan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam peneguhan masyarakat multikultural Indonesia. Adapun hal-hal yang perlu dimiliki guru PKn salah satunya adalah memahami tentang pembelajaran PKn berbasis multikultural, karena dengan memahami PKn multikultural, guru nantinya akan mampu mengembangkan materi Pendidikan Kewarganegaraan berbasis multikultural. Dengan demikian, peneguhan masyarakat multikultural Indonesia akan tercapai melalui aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan. Langkah-langkah pembelajaran PKn berbasis multikultural dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Langkah-langkah Pembelajaran PKn Berbasis Multikultural (Rondli, 2014: 4)

Berdasarkan tabel yang ada di atas terdapat lima tahap yang perlu dilakukan oleh seorang guru mengenai langkah-langkah pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal. *Pertama*, menentukan materi pembelajaran dari Standar Kompetensi dan

Kompetensi Dasar apa yang akan diajarkan berbasis multikultural sesuai dengan Permendiknas No 22 Tahun 2006. Sebab tidak semua materi dapat disamakan melalui proses pembelajaran berbasis multikultural. Pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X semester pertama materi yang dapat disampaikan melalui proses pembelajaran berbasis multikultural salah satunya materi tentang memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, menetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan indikator yang ditetapkan dari Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam pembelajaran PKn berbasis multikultural. *Ketiga*, menetapkan metode yang akan digunakan, dalam hal ini penulis menganjurkan untuk menggunakan metode *Contextual Teaching and Learning (CTL)*.

Metode CTL ditentukan oleh guru sendiri dan disesuaikan dengan karakteristik dan materi yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. *Keempat*, menentukan media pembelajaran yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Guru dalam menentukan media harus jeli dan bisa menyesuaikan dengan sarana prasarana yang ada disekolah, menggunakan media pembelajaran disini bertujuan agar memberika kemudahan pada siswa untuk memahami materi secara mendalam. *Kelima*, setelah semua langkah-langkah yang ada sudah terlaksana maka guru selanjutnya melakukan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilannya.

Berkenaan dengan sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Aly, (2005) menjelaskan tiga faktor dalam manajemen pembelajaran, yaitu: (a) lingkungan fisik (*physical environment*), (b) lingkungan sosial (*human environment*), dan (c) gaya pengajaran guru (*teaching style*). Selama proses pembelajaran yang diperlukan siswa adalah lingkungan sosial dan fisik yang nyaman serta menyenangkan, untuk itu guru sebagai pendidik harus mampu mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya adalah penataan meja dan kursi, warna, tanaman, dan pencahayaan. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan sosial dan fisik yang aman dan nyaman untuk siswa. Lebih dari itu, guru juga harus mampu memahami latar belakang budaya siswanya karena dengan guru yang memiliki pemahaman terhadap latar belakang budaya siswanya, akan menciptakan lingkungan fisik yang kondusif untuk belajar. Lingkungan yang

nyaman atau kondusif dapat diciptakan oleh seorang guru melalui beberapa bahasa yang dipilih, hubungan interaksi, dan berlaku adil pada siswa yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda.

Selain lingkungan fisik dan sosial, siswa juga memerlukan gaya pengajaran guru yang menggembirakan. Dalam proses pembelajaran, gaya kepemimpinan guru sangat berpengaruh bagi ada-tidaknya peluang siswa untuk berbagi pendapat dan membuat keputusan. Gaya kepemimpinan guru berkisar pada otoriter, demokratis, dan bebas (*laizzes faire*). Gaya kepemimpinan otoriter tidak memberikan peluang kepada siswa untuk saling berbagi pendapat. Apa yang diajarkan guru kepada siswa ditentukan sendiri oleh sang guru. Sebaliknya, gaya kepemimpinan guru yang demokratis memberikan peluang kepada siswa untuk menentukan materi yang perlu dipelajari siswa. Kepemimpinan bebas yang digunakan oleh seorang guru akan lebih membebaskan siswa untuk memilih materi pembelajaran di dalam kelas.

Bentuk pendekatan yang demokratis ini akan sangat membantu siswa memahami materi yang dikembangkan dikelas maupun luar kelas. Pendekatan seperti ini, berbagai macam strategi dapat digunakan oleh guru, seperti simulasi, observasi, dialog, penanganan kasus, dan diskusi kelompok (Aly, 2003: 70-71). Melalui dialog para guru, misalnya, mendiskusikan sumbangan aneka budaya dan orang dari suku lain dalam hidup bersama sebagai bangsa. Lebih dari itu, guru juga dapat berdialog dan mendiskusikan kepada semua siswa yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Sementara itu, melalui simulasi dan bermain peran, para siswa difasilitasi untuk memerankan diri sebagai orang-orang yang memiliki agama, budaya, dan etnik tertentu dalam pergaulan sehari-hari. Dalam momen-momen tertentu, diadakan proyek dan kepanitiaan bersama, dengan melibatkan aneka macam siswa dari berbagai agama, etnik, budaya, dan bahasa yang beragam. Sedangkan melalui observasi dan penanganan kasus, siswa dan guru difasilitasi untuk tinggal beberapa hari di masyarakat multikultural. Mereka diminta untuk mengamati proses sosial yang terjadi di antara individu dan kelompok yang ada, sekaligus untuk melakukan mediasi bila ada konflik di antara mereka.

Dengan strategi pembelajaran tersebut para siswa diasumsikan akan memiliki wawasan dan

pemahaman yang mendalam tentang adanya keragaman dalam kehidupan sosial. Bahkan, mereka akan memiliki pengalaman nyata untuk melibatkan diri dalam mempraktikkan nilai-nilai dari pendidikan multikultural dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku yang toleran, simpatik, dan empatik pun pada gilirannya akan tumbuh pada diri masing-masing siswa. Dengan demikian, proses pembelajaran yang difasilitasi guru tidak sekadar berorientasi pada ranah kognitif, melainkan pada ranah afektif dan psikomotorik sekaligus. Selanjutnya, pendekatan demokratis dalam proses pembelajaran dengan beragam strategi pembelajaran tersebut menempatkan guru dan siswa memiliki status yang setara (*equal status*), karena masing-masing dari mereka merupakan anggota komunitas kelas yang setara juga. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang absolut. Perilaku guru dan siswa harus diarahkan oleh kepentingan individu dan kelompok secara seimbang.

Lebih dari itu, pembelajaran yang menggunakan pendekatan demokratis ini guru dituntut untuk memiliki kompetensi multikultural. Ada enam kompetensi multikultural guru yang ditawarkan oleh Farid Elashmawi dan Philip P. Harris (Aly, 2005), yaitu: (a) memiliki nilai dan hubungan sosial yang luas, (b) terbuka dan fleksibel dalam mengelola keragaman siswa, (c) siap menerima perbedaan disiplin ilmu, latar belakang, ras, dan gender; (d) memfasilitasi pendatang baru dan siswa yang minoritas, (e) mau berkolaborasi dan koalisi dengan pihak mana pun, dan (f) berorientasi pada program dan masa depan. Lebih lanjut James A. Bank (Aly, 2005) menambahkan kompetensi multikultural lain yang harus dimiliki oleh guru, yaitu: (a) sensitif terhadap perilaku etnik para siswa, (b) sensitif terhadap kemungkinan adanya kontroversi tentang materi ajar, dan (c) menggunakan teknik pembelajaran kelompok untuk mempromosikan integrasi etnik dalam pembelajaran.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan paraksis menjadi suatu usaha dalam meneguhkan masyarakat multikultural Indonesia yang damai. Dengan pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan, siswa akan dibekali pemahaman yang mendalam terkait bagaimana menyikapi keragaman dan siswa juga ditanamkan kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya, sebab materi yang termuat dalam Pendidikan Kewarganegaraan sejalan dengan nilai-nilai multikultural Indonesia, yang diperlukan sekarang hanya tinggal bagaimana seorang guru mampu memahami keragaman, mampu mengembangkan pembelajaran, dan mampu menggunakan media pembelajaran.

Lebih dari itu, pendidikan multikultural melalui pendidikan kewarganegaraan juga menemukan relevansinya untuk konteks Indonesia. Sebagai sebuah konsep, pendidikan multikultural sejalan dengan semangat semboyan bangsa Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika". Semboyan yang sangat adil dan demokratis ini memiliki pengertian bahwa Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang terdiri dari beragam suku dan ras, yang mempunyai budaya, bahasa, dan agama yang berbeda-beda tetapi dalam kesatuan Indonesia. Semboyan ini mengandung seni manajemen untuk mengatur keragaman Indonesia (the art of managing diversity).

Peneguhan masyarakat multikultural Indonesia akan tercapai dengan cara mengaktualisasikan Pendidikan Kewarganegaraan sebab di dalam Pendidikan Kewarganegaraan termuat domain materi tentang keragaman atau menjaga keutuhan negara Indonesia. Dengan demikian, untuk menunjang keberhasilan dalam peneguhan masyarakat multikultural Indonesia melalui aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan diperlukan implementasi PKN berbasis multikultural dan pemahaman guru terhadap langkah-langkah dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis multikultural, mulai dari perencanaan, tujuan, materi, metode, dan media pembelajaran.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih saya ucapkan untuk teman-teman dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2016 bung Erwin, bung Setiawan, bung Furkan, dan bung Gusti yang telah memberikan koreksi dan saran terhadap karya tulis

ini sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, A. (2005). "Pendidikan multikultural dalam tinjauan pedagogik". Makalah dipresentasikan pada "Seminar Pendidikan Multikultural sebagai Seni Mengelola Keragaman", yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSB-PS) Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada Sabtu, 8 Januari 2005.
- Arif, D.B. (2008). "Kompetensi Kewarganegaraan untuk Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia". *Acta Civicus: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1 (3). 19-25
- Azra, A. (2006). Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme". Dalam *Restorasi Pancasila: Mendamaikan politik identitas dan modernitas*. Bogor: Brighten Press.
- Bank, J.A. (1989). *Multicultural education: Issues and perspectives*. London: Allyn and Bacon Press.
- Blum, L. A. (2001). "Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar-Ras: Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik bagi Sebuah Masyarakat Multikultural". Dalam May, Larry, Shari Collins-Chobanian, and Kai Wong (Eds). *Etika Terapan I: Sebuah pendekatan multikultural*. Terjemahan oleh Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Cogan, J. J., & Derricott, R. (1998). *Citizenship for the 21st Century: An international perspective on education*. London: Kogan Page.
- Depdiknas. (2006). Permendiknas No 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi. Jakarta: Depdiknas.
- Garcia, R. L. (1982). *Teaching in a pluristic society: Concepts, models, strategies*. New York: Harper & Row Publisher.
- Goh, M. (2012). Teaching with cultural intelligence: developing multiculturally educated and globally engaged citizens. *Asia Pacific Journal of Education*, 32 (4), 395-415
- Hefner, R.W. (2007). *Politik multikulturalisme: Menggugat realitas kebangsaan*. Terjemahan oleh Bernardus Hidayat dari judul asli "The Politics of Multiculturalism, Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia". Yogyakarta: Kanisius.
- Huerta, G.C. (2016). Barriers to the Implementation of Multicultural Education in a Secondary Teacher Preparation Program. *The High School Journal*, 82 (3) 150-164
- Hidayatullah, M.F. (2011). "Pendidikan Karakter dan Pengembangan Metode Pembelajaran Nilai". Bahan tayangan disampaikan dalam Pentaloka Doswar se-Jawa Tengah dan DIY di Dodik Bela

- Negara Resimen Kodam IV/Diponegoro Magelang, 12 April 2011.
- Karsten, S. Kubow, P. Matrai, Z. & Pitiyanuwat, S. (2000). Challenges facing the 21st century citizen: Views of policy makers. In J. Cogan & R. Derricott (Eds.), *Citizenship for the 21st century: An international perspective on education* (pp. 109–130). London: Kogan Page.
- Kubow, P. Grossman, D.L. & Ninomiya, A. (2000). Multidimensional citizenship: Educational policy for the 21st century. In J. Cogan & R. Derricott (Eds.), *Citizenship for the 21st century: An international perspective on education* (pp. 131–150). London: Kogan Page.
- Rondli, W.S. (2014). Strategi pembelajaran PKn berbasis multikultural: Studi kasus di SMA Mataram Kota Semarang *Jurnal Ilmiah Civic*, IV (2): 4-5
- Saha, L.J. (1997). *International encyclopedia of sociology of education (Resources in Education Series)*. New York: Pergamon
- Saifuddin, A.F. (2006). Reposisi Pandangan mengenai Pancasila: Dari Pluralisme ke Multikulturalisme. Dalam *Restorasi Pancasila: Mendamaikan politik identitas dan modernitas*. Bogor: Brighten Press.
- Suharyanto, A., (2013). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (1): 192-203
- _____. (2015). Dilema Multikulturalisme Pada Masyarakat Multikultur Di Medan, Sumatera Utara. *Jurnal Kewarganegaraan*. 25 (2): 118-127
- _____. (2017), Pemahaman Siswa Tentang Konsep Demokrasi Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, dalam *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017 Vol. 1 No. 1 2017*, Hal. 530-534
- Suparlan, P. (2005). Sukubangsa dan hubungan antar sukubangsa. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Tilaar, H.A.R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wang, J. Lin, E. Spalding, E. Odell, S. J. & Klecka, C. L. (2011). Understanding teacher education in an era of globalization. *Journal of Teacher Education*, 62 (2), 115–120.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada